BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Pengkajian Model Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Bengkalis, maka dapat diketengahkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Profil UKM di Kabupaten Bengkalis ditinjau dari aspek kelembagaan dari sisi bentuk badan usaha UKM umumnya berbentuk perorangan yakni sebanyak 78.13 % dan selebihnya sebesar 21,88 % sudah memiliki bentuk badan hukum (PT, CV, FA, Koperasi). Dan dari sisi legalitas usaha, berdasarkan sampel yang diperoleh menunjukkan bahwa UKM yang ada sebanyak 76.25 % sudah memiliki izin usaha, sedangkan selebihnya sebanyak 23.75 % belum memiliki Legalitas usaha. Ditinjau dari kemitraan usaha yang dijalankan hanya 4.06% yang menjalin kemitraan dengan pihak lain terutama dalam hal kegiatan pemasaran produk usaha dan sebanyak 95.94% belum melakukan kegiatan kemitraan dengan pihak lain.
2. Dari aspek manajerial, maka berdasarkan sampel yang diperoleh menunjukkan bahwa UKM yang ada sebanyak 82.81 % dikelola oleh lingkungan keluarga, sedangkan selebihnya sebanyak 17.19% menggunakan pegawai dari pihak luar keluarga. Sebanyak 10.31% telah melakukan pembagian tugas dengan baik dan 89.69% dalam melakukan usaha belum menjalankan atau tidak ada pembagian tugas yang jelas.
3. Dari sisi keuangan UKM, maka diperoleh hasil kajian yang menunjukkan bahwa asset UKM yang ada sebanyak 87.19% berada dibawah Rp 100 juta dan sebanyak 12.81% memiliki asset lebih dari Rp 100 juta. Sedangkan profit margin yang diperoleh menunjukkan bahwa UKM yang ada sebanyak 85.94 % memperoleh profit margin kurang dari Rp 1 juta dan 14.06% memperoleh profit margin lebih dari Rp 1 juta. Dari aspek permodalan, maka UKM yang ada sebanyak 89.06 % dalam menjalankan usahanya menggunakan modal sendiri

dan 1.88% menggunakan permodalan dari koperasi dan sisanya 9.38 % permodalan bersumber dari pihak lain.

4. Adapun UKM yang telah menggunakan teknologi ada sebanyak 6.25% dalam menjalankan usahanya, sebanyak 72.50% menggunakan teknologi menengah dan sisanya 21.25 % masih menggunakan cara kerja tradisional.
5. Hasil analisis LQ yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa di Kabupaten Bengkalis sektor , Pertanian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas & Air Minum, Sektor perdagangan, hotel dan restoran serta Jasa-jasa adalah merupakan sektor-sektor yang mempunyai tingkat spesialisasi lebih besar dari sektor yang sama di tingkat propinsi. Hal ini berarti sektor tersebut mempunyai nilai LQ yang besar serta mempunyai nilai kontribusi terhadap PDRB. Dengan demikian sektor-sektor tersebut yang terus mengalami peningkatan (nilai LQ > 1), merupakan subsektor unggulan di Kabupaten Bengkalis dan potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian daerah.
6. Jenis usaha kerakyatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan pada sektor perdagangan adalah jenis usaha perdagangan besar dan eceran dari berbagai jenis produk, untuk sektor jasa jenis usaha jasa perseorangan dan rumah tangga menjadi cukup potensial dan ditopang oleh perkembangan beberapa kecamatan menjadi wilayah strategis seperti Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir. Selain kedua sektor tersebut sektor industri pengolahan juga menjadi potensial terutama jenis pengolahan makanan tradisional, selain itu juga kondisi alam yang mendukung jenis usaha pembuatan batu bata menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan.
7. Berdasarkan kategori industri besar yang ada dan dikaitkan dengan komoditi unggulan UKM yang ada berdasarkan analisis LQ dan MPE yang di lakukan maka model kemitraan pengembangan UKM di Kabupaten Bengkalis yang tepat adalah model kemitraan CSR.

5.2. Rekomendasi

Dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan melalui potensi daerah pesisir, maka disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Dalam pengembangan UKM diperlukan regulasi dari pemerintah dalam bentuk, Kemudahan dalam Akses Permodalan, Bantuan Pembangunan Prasarana, Pengembangan Skala Usaha, Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Peningkatan Akses Teknologi, Mewujudkan iklim bisnis yang lebih kondusif.
2. Diperlukan kepedulian perusahaan besar dengan program kemitraan pola CSR yang juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, khususnya dalam rangka pengurangan dampak gejolak sosial. Pengembangan program kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti *community development*, peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Bentuk program CSR lainnya adalah pengembangan lembaga layanan bisnis dan yayasan lain yang intinya diarahkan untuk pengembangan UMKM.
3. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk mendorong program CSR bagi pengembangan UKM, yang isinya mengatur: (a) Tujuan dan Sasaran CSR; (b) Penetapan Besaran CSR; (c) Hak dan Kewajiban Perusahaan Besar; (d) Hak dan Kewajiban UKM; (e) Penggunaan CSR dan (f) Peran Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Setiap kebijakan yang dikeluarkan dikawal dan dilaksanakan dengan penuh komitmen dan konsisten.
5. Bagi perusahaan besar yang memberikan kontribusi dan prestasi yang besar dan baik dalam penguatan UKM seyogyanya diberikan penghargaan atau *reward* sehingga mampu menumbuhkan semangat dan gairah bagi perusahaan besar lainnya yang kurang menunjukkan prestasinya.